

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA KLIPING

KLASIFIKASI : Perguruan Tinggi Umum
TEMA : Forum Rektor Tolak Liberalisasi Pendidikan
NARA SUMBER : Suara Pembaruan

Hari Kamis Tanggal 1 Bulan Desember Tahun 2005 Kolom 15

RINGKASAN :

Masuknya sektor pendidikan sebagai salah satu sektor jasa dalam perdagangan bebas (World Trade Organization/WTO) masih belum menemukan titik temu. Meskipun Indonesia sudah setuju untuk memasukkan hal tersebut, tetapi penolakan masih terus bermunculan. Menjelang penandatanganan final *General Agreement on Trade in Services (GATS)* pada Desember mendatang di Hongkong, Aliansi Advokasi Pendidikan menyelenggarakan diskusi mengenai hal tersebut di Jakarta pada Rabu, 30 November 2005. Dalam diskusi tersebut, hadir ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Wibisono Hardjopranoto dan Adji Suksmo, wakil Indonesia di forum WTO. Wibisono menegaskan bahwa FRI tetap pada pendapat awalnya, yaitu menolak pendidikan sebagai sektor jasa dalam kerangka WTO. Forum Rektor berpendapat, jika seharusnya pola pendidikan di era globalisasi adalah pengembangan kerja sama, bukan membuka pintu lebar-lebar bagi perguruan tinggi (PT) asing membuka cabang di Indonesia. Ia khawatir, bila PT asing bisa dengan bebas masuk maka akan membuat kondisi PT di Indonesia semakin tenggelam.

REKOMENDASI

R

Forum Rektor Tolak Liberalisasi Pendidikan

JAKARTA - Masuknya sektor pendidikan sebagai salah satu sektor jasa dalam perdagangan bebas (World Trade Organization/ WTO) masih belum menemukan titik temu. Meski Indonesia sudah setuju untuk memasukkan hal tersebut, tetapi pendidikan masih terus bermutual. Sesuai dengan kesepakatan WTO, pendidikan akan masuk sebagai sektor jasa. Tetapi hal itu dinilai mendorong pendidikan ke arah liberalisasi. Menjelang penandatanganan final General Agreement on Trade in Services (GATS) pada Desember mendatang di Hong Kong, Aliansi Advokasi Pendidikan menyelenggarakan diskusi mengenai hal tersebut di Jakarta, Rabu (30/11).

Dalam diskusi tersebut, antara lain hadir Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Wibisono Hardjopranoto dan Adji Saksono, wakil Indonesia di forum WTO.

Wibisono menegaskan FRI tetap pada pendapat awal, yakni menolak pendid-

dikan sebagai sektor jasa dalam kerangka WTO.

"Kami tetap menolak pendidikan dimasukkan sebagai sektor jasa karena pendidikan bukanlah sesuatu yang biasa. Pendidikan perlu diperhatikan untuk memelihara budaya-budaya lokal sehingga tidak bisa disatukan dengan sektor jasa lain," katanya.

Forum Rektor berpendapat bahwa kerangka kerja sama di bidang pendidikan tidak bisa dibiarkan terbuka begitu saja. Seharusnya, pola pendidikan di era globalisasi adalah pengembangan kerja sama, bukan membuka pintu lebar-lebar bagi perguruan tinggi (PT) asing membuka cabang di Indonesia. Dia khawatir bila PT asing bisa dengan bebas masuk, akan membuat kondisi PT di Indonesia semakin tergelam.

Saat ini ada lebih dari 2.000 PT di Indonesia, tetapi baru sekitar 900-an yang terakreditasi. Sementara sekitar 70 persen PT mempunyai mahasiswa di bawah 1.500. Artinya, banyak kondisi PT yang

masih sangat minim dan bila tugas mendidik anak bangsa diambil alih PT asing, maka hal tersebut dapat membahayakan kelangsungan sebuah bangsa.

Menurut dia, penolakan masuknya pendidikan dibatasi dalam kerangka WTO sak halanya muncul dari Forum Rektor UGM dan ITB pun juga menolak bila pendidikan dimasukkan dalam sektor jasa.

Defensif

Sementara itu, Adji Saksono menjelaskan hingga saat ini masyarakat masih memandang perdagangan bebas secara defensif. Padahal, ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan dalam perdagangan bebas di sektor pendidikan. "Semua memandang kita defensif, kita hanya menerima. Padahal tidak demikian. Ada banyak keuntungan kalau kita membuka pasar kita pada mereka. Misalnya kalau kita membuka diri di bidang pendidikan, mereka juga harus memberi sesuatu pada kita."

katanya.

Misalnya dalam perundingan WTO, pihak Indonesia sudah meminta negara-negara maju, di antaranya Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, membuka sektor pendidikan. Mereka bisa masuk ke Indonesia, dengan catatan mereka juga membuka pasar-nya bagi Indonesia. "Banyak yang menganggap ini gila, tetapi sebenarnya tidak. Kita mempunyai banyak potensi di bidang pendidikan, terutama sektor pendidikan informal. Banyak kelebihan yang kita punya di sektor itu, misalnya para petani tradisional dan perawat spa. Kita jauh lebih maju," katanya.

Sementara itu, Aliansi Advokasi Pendidikan mempunyai dua pandangan mengenai perdagangan bebas di bidang pendidikan. Pertama, mereka meminta pemerintah dan rakyat Indonesia secara sermat dan cerdas merespons arus neoliberalisme secara defensif agar dampak negatif dapat diminimalisasi. Dengan kata lain, pelatasaan liberalisasi pen-

didikan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangan hubungan yang simetris.

Indonesia harus menghadapi liberalisasi dengan kebijakan yang antisipatif agar tidak sampai menghancurkan sektor pendidikan. Pandangan kedua adalah menolak neoliberalisme sehingga GATS harus ditolak.

Akhirnya setelah berdiskusi, rekomendasi yang muncul adalah Indonesia menolak pemberlakuan pendidikan sebagai komoditas yang diatur melalui GATS. Oleh karena itu, seharusnya rencana pemerintah untuk menandatangani GATS dibatalkan. Selain itu, peraturan yang ada hendaknya diamandemen.

Menanggapi berbagai desakan tersebut, Adji menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa mundur begitu saja dari kesepakatan internasional. "Indonesia telah menandatangani komitmen untuk ikut dalam WTO dan sudah disahkan dalam UU Nomor 7 tahun 2004," katanya. (A-22)

21